

WORKSHOP

UJI KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT

Berdasarkan Permenkes RI No. 6 Tahun 2026

Legalitas • Perizinan • SDM • Sarana • Risiko • Rekomendasi

PROGRESS KEPATUHAN

85% Patuh

Tingkat Kepatuhan: Baik

RISK SCORE

25 Rendah

Level Risiko: Rendah

RINGKASAN AUDIT

Total Aspek	120
Patuh	102
Sebagian Patuh	12
Tidak Patuh	6
Belum Dinilai	0

CHECKLIST AUDIT

- Legalitas & Perizinan: Patuh
- Sumber Daya Manusia: Patuh
- Sarana & Prasarana: Sebagian Patuh
- Manajemen Risiko: Patuh
- Tata Kelola & Mutu: Patuh

DAFTAR DOKUMEN

- Surat Izin Operasional: Terverifikasi
- Sertifikat Akreditasi: Terverifikasi
- Dokumen SDM: Terverifikasi
- Kebijakan & SOP: Terverifikasi
- Manajemen Risiko: Terverifikasi

1. SISTEMATIS
Metode dasar hukum sampai rekomendasi

2. PRAKTIS
Langsung dapat diterapkan di rumah sakit

3. TERUKUR
Penilaian patuh, risiko, dan prioritas

4. PROFESIONAL
Cocok untuk legal, compliance, dan manajemen

Mendukung legalitas, mutu layanan, dan tata kelola rumah sakit

PROPOSAL WORKSHOP

UJI KEPATUHAN HUKUM RUMAH SAKIT

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2026

Program pelatihan untuk umum - praktis, sistematis, dan berbasis uji kepatuhan

RINGKASAN PROGRAM

Nama Program	Workshop Uji Kepatuhan Hukum Rumah Sakit
Dasar Utama	Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2026
Peserta	Direksi, manajemen, legal, compliance, auditor, SDM, pengelola rumah sakit, konsultan, dan profesional terkait
Pendekatan	Dasar Hukum -> Kriteria -> Kondisi -> Bukti -> Opini -> Risiko -> Rekomendasi
Sifat Workshop	Terbuka untuk umum, aplikatif, berbasis studi kasus dan simulasi

1. Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien, mutu layanan, tata kelola, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2026 menjadi salah satu acuan penting yang perlu dipahami dan diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit.

Dalam praktiknya, kepatuhan hukum tidak cukup hanya dengan mengetahui isi peraturan. Rumah sakit perlu memiliki cara pemeriksaan yang sistematis untuk memastikan legalitas, perizinan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan, serta dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko administratif, operasional, perdata, pidana, finansial, dan reputasi.

Workshop ini dirancang untuk membantu peserta melakukan uji kepatuhan hukum secara praktis. Peserta tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga berlatih mengubah ketentuan hukum menjadi kriteria pemeriksaan, memeriksa bukti, menentukan status kepatuhan, menilai risiko, serta menyusun rekomendasi dan tindakan perbaikan.

2. Tujuan Workshop

- Memahami kewajiban hukum utama rumah sakit berdasarkan Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2026.
- Mampu menyusun kriteria kepatuhan dari ketentuan hukum yang berlaku.
- Mampu memeriksa kondisi dan bukti secara objektif dan terdokumentasi.
- Mampu mengidentifikasi risiko hukum akibat ketidakpatuhan.
- Mampu menyusun rekomendasi dan corrective action yang realistis.
- Mampu membuat laporan uji kepatuhan yang dapat digunakan sebagai bahan keputusan manajemen.

3. Ruang Lingkup / Pokok Bahasan

Pokok Bahasan	Fokus Pembelajaran
Legalitas Badan Hukum	Pemeriksaan bentuk badan hukum, akta pendirian dan perubahan, kewenangan pengurus, serta kesesuaian kegiatan penyelenggaraan rumah sakit.
Perizinan Berusaha	Pemeriksaan NIB, OSS, izin operasional, masa berlaku izin, dan kesesuaian antara izin dengan kegiatan yang dijalankan.
Lokasi dan Tata Ruang	Penilaian kesesuaian lokasi, peruntukan ruang, dokumen tata ruang, aksesibilitas, dan persyaratan teknis terkait.
Sarana, Prasarana, dan Peralatan	Pemeriksaan bangunan, ruang pelayanan, fasilitas pendukung, sistem keselamatan, alat kesehatan, kelaikan, dan pemeliharaan.
Klasifikasi dan Kapasitas Pelayanan	Penilaian kesesuaian kelas rumah sakit, jenis layanan, kapasitas, fasilitas, dan kemampuan pelayanan.
Sumber Daya Manusia	Pemeriksaan ketersediaan, kompetensi, registrasi, izin praktik, penempatan, dan kelengkapan dokumen tenaga kesehatan.
Dokumen dan Bukti Kepatuhan	Teknik menginventarisasi, memeriksa, memverifikasi, dan menghubungkan dokumen dengan kriteria kepatuhan.
Opini Kepatuhan dan Risiko	Penetapan status patuh, sebagian patuh, tidak patuh, serta analisis dampak dan prioritas risiko.
Rekomendasi dan Corrective Action	Penyusunan tindakan perbaikan, penanggung jawab, prioritas, dan target waktu penyelesaian.

4. Metode Uji Kepatuhan

Metode utama workshop menggunakan alur yang sederhana dan dapat diterapkan dalam audit internal maupun evaluasi kepatuhan:

DASAR HUKUM -> KRITERIA -> KONDISI -> BUKTI -> OPINI -> RISIKO -> REKOMENDASI

Setiap ketentuan hukum diubah menjadi kriteria yang dapat diperiksa. Kondisi aktual kemudian dibandingkan dengan kriteria tersebut dan didukung bukti yang dapat diverifikasi. Dari proses ini peserta menyusun opini kepatuhan, menentukan risiko, serta merancang tindakan perbaikan.

5. Metode Pembelajaran

- Pemaparan regulasi dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Studi kasus dan diskusi kelompok.
- Latihan menyusun checklist kepatuhan.
- Simulasi pemeriksaan dokumen dan bukti.
- Latihan menyusun opini dan analisis risiko.
- Penyusunan rekomendasi dan corrective action plan.
- Evaluasi hasil uji kepatuhan dan pembahasan praktik terbaik.

6. Sasaran Peserta

- Direksi, komisaris, pemilik, dan manajemen rumah sakit.
- Legal Officer, Legal Manager, dan Compliance Officer.
- Satuan Pengawas Internal dan Internal Auditor.
- Manajemen Risiko, Quality Management, dan pengelola mutu.
- HR/SDM dan pengelola tenaga kesehatan.
- Tim perizinan dan administrasi rumah sakit.
- Konsultan hukum, konsultan rumah sakit, dan profesional terkait.
- Peserta umum yang ingin memahami sistem kepatuhan hukum rumah sakit.

7. Hasil yang Diharapkan

- Peserta mampu melakukan uji kepatuhan hukum secara lebih sistematis.
- Peserta mampu mengidentifikasi kewajiban hukum dan bukti yang harus tersedia.
- Peserta mampu mengukur tingkat kepatuhan serta memetakan risiko.
- Peserta mampu menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko.
- Peserta mampu menyusun laporan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti manajemen.

8. Manfaat Praktis

Workshop membantu rumah sakit mendeteksi potensi ketidakpatuhan lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan hukum atau operasional. Bagi manajemen, hasil uji kepatuhan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Bagi legal dan compliance, metode ini menjadi kerangka kerja untuk monitoring yang lebih konsisten. Bagi auditor internal, hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.

Secara keseluruhan, penerapan uji kepatuhan yang baik mendukung legalitas, mutu layanan, tata kelola, pengendalian risiko, serta kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap rumah sakit.

9. Output Peserta

- Checklist Uji Kepatuhan Hukum Rumah Sakit
- Daftar Dasar Hukum dan Kriteria Kepatuhan
- Daftar Dokumen dan Bukti yang Harus Diperiksa
- Format Penilaian Kondisi dan Status Kepatuhan
- Template Opini Kepatuhan Hukum
- Daftar dan Skala Prioritas Risiko
- Template Rekomendasi Perbaikan
- Corrective Action Plan
- Format Laporan Uji Tuntas Kepatuhan Hukum

10. Format Pelaksanaan

Workshop dapat dilaksanakan dalam format kelas publik, in-house training, maupun program khusus untuk rumah sakit atau kelompok rumah sakit. Durasi, jadwal, jumlah peserta, lokasi, fasilitas, narasumber, dan biaya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara.

11. Penutup

Kepatuhan hukum yang baik bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi untuk memastikan rumah sakit memiliki tata kelola yang sehat, layanan yang aman, serta sistem pengendalian risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Workshop ini memberikan kerangka praktis agar kepatuhan dapat diukur, dibuktikan, diperbaiki, dan dipantau secara berkelanjutan.

Dasar Hukum -> Kriteria -> Kondisi -> Bukti -> Opini -> Risiko -> Rekomendasi -> Tindakan Perbaikan

Kerangka sederhana untuk membangun sistem kepatuhan hukum rumah sakit yang terukur dan berkelanjutan.